

## MENELAAH KEMISKINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

**Henny Oktavianti**

*Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*

### ABSTRACT

*The poverty alleviation has been a main problem in Indonesia for a long time. The numbers of poverty has been increased for more than one-third in the crisis that has returned into the before-crisis period. Meanwhile, Indonesia has experienced a great transformation in social and political in line with the development of full spirit of democracy by the existence of government's decentralization, and also a wider transparency than what we have in the past. The commitment of the government in alleviating poverty has been stated in Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 which based on the Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). However, the rate of poverty is still high, viewed from any factors. This paper focuses on the discussion of poverty that did not abate in spite of various poverty alleviation programs has been announced by the government. The writer has analyzed the absolute phenomena of poverty based on the political view, which the variables are related to the economic growth since the basic economic activities could affect the level of poverty (Weede, 1986, saunders, 1986, Castles, 1990, 1991, in Lane & Ersson, 2002).*

**Keywords:** *poverty, Indonesia, economic and political perspectives*

### A. LATAR BELAKANG

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Kemiskinan adalah simbol sosial yang nyaris absolut dan tak terpecahkan. Sejak masa kolonial hingga saat ini, predikat negeri miskin seakan sulit lepas dari bangsa yang potensi kandungan kekayaan alamnya terkenal melimpah. Cerita pilu kemiskinan seakan kian lengkap dengan terjadinya berbagai musibah alam dan bencana buatan: gempa bumi, tsunami, lumpur panas Lapindo, dan kebakaran hutan yang diikuti kabut asap. Kantung-kantung kemiskinan di negeri ini kian hari kian menyebar bak virus ganas, mulai dari lapisan masyarakat pedesaan, kaum urban perkotaan, penganggur, hingga ke kampung-kampung nelayan. Menurut Yustika (2007) persoalan kemiskinan telah sedemikian peliknya untuk diurai dan dipecahkan. Hal ini disebabkan oleh multispektrum dari makna kemiskinan, sehingga definisi dan pengukurannya tidak mudah dituntaskan dengan satu pengertian saja.

Lepas dari perdebatan indikator yang digunakan, data kemiskinan di negeri ini terus menunjukkan trend memburuk. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 17 persen dari populasi

penduduk yang kini telah mencapai angka 220 juta jiwa. Padahal, perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negeri ini. Di era Orde Baru, misalnya, pemerintah menggalang berbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot di berbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit modal kerja digelar, bahkan utang luar negeri pun ditempuh sebagai alternatif untuk menopang *idea of progress* bernama pembangunan. Akan tetapi, karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, hasil pembangunan ala Orde Baru itu tak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Yang terjadi, seluruh angka-angka keberhasilan pembangunan yang digarap secara intens selama 30 tahun itu, rontok tersapu krisis ekonomi dan gejolak politik tahun 1998. Permasalahan kemiskinan baik dilihat dari segi sosial maupun politik tidak akan terlepas dari pengaruh perekonomian dan kondisi perpolitikan suatu bangsa.

Meski pemerintahan terus berganti, kemiskinan tetap saja menjadi virus endemis yang terus mendera rakyat. Secara empirik, data pemerintah menunjukkan, 70 persen rakyat Indonesia menggantungkan sumber penghidupannya dari sektor ekonomi mikro berbasis sumber daya alam terbarukan. Di sektor pertanian, petani Indonesia telah sejak lama mengembangkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Di sektor kelautan dan perikanan, nelayan kita sanggup mengembangkan perikanan budi daya, perikanan tangkap, industri bioteknologi kelautan, dan *non-conventional ocean resources*. Sementara di sektor kehutanan, masyarakat kita mampu mengoptimalkan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman industri, dan *agroforestry*.

Pada level teknis, data tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 23 persen anggaran pembangunan pemerintah yang digunakan. Akibatnya, dana pembangunan yang berjumlah lebih dari Rp 50 triliun parkir di Bank Indonesia. Sementara di bank pembangunan daerah (pengelola dana pemerintah daerah), lebih dari Rp 40 triliun juga parkir dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana “menganggur” ini semestinya bisa digunakan untuk membantu percepatan pertumbuhan sektor riil agar mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.

Pada level global, Indonesia juga telah masuk dalam kategori negara yang paling gagal dalam pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs), sebuah komitmen global yang ikut ditandatangani pemerintah Indonesia guna mengatasi masalah kemiskinan akut. Padahal, kucuran dana yang datang dari World Bank, IMF, ADB, CGI, dan donor bilateral (baik dalam bentuk hibah maupun utang) yang mengatasnamakan penanggulangan kemiskinan mencapai angka puluhan milyar dolar. Di sini, komitmen melawan kemiskinan menjadi patut dipertanyakan.

Contoh nyata melawan kemiskinan sebenarnya telah terbentang di depan mata. Pada aras global, gerakan masyarakat sipil anti globalisasi-neoliberal (sejak Seattle, Cancun, Hongkong, hingga Singapura) terus menyerukan “Global Call to Action Against Poverty”. Mereka dengan gamblang menunjukkan berbagai metode dan aksi-aksi politik nyata guna melawan sumber-sumber kemiskinan. Juga Ikhtiar seorang Muhammad Yunus, pemenang nobel perdamaian 2006, yang mendesain model “Bank Grameen” (dan fungsi intermediasi)-nya sebagai solusi efektif memerangi kemiskinan di Bangladesh, sejatinya bisa menjadi sumber inspirasi mutakhir bagi kita dalam melawan kemiskinan.

Masalahnya sekarang, apakah para elite, politisi, dan birokrat kita punya keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika negara tak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalam memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi, maka kemiskinan bangsa—yang di masa kolonial pernah disebut “nation van Koelis”—mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.

## **B. KAJIAN TEORITIS**

### **Pendekatan Ekonomi Politik**

*Pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah.*

---

*Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap bidang ekonomi. Besaran-besaran ekonomi seperti mekanisme pasar (market mechanism), harga dan investasi dianalisis dengan mempergunakan setting sistem politik di mana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi. Dengan begitu, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (a place to act) (Caporaso dan Levine, J 993:31). Pada titik ini, fokus ekonomi politik adalah menerangkan apa tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan oleh para aktor tertentu pada waktu mereka melakukan kegiatan politik. Salah satu contoh paling canggih dari cara berpikir pendekatan ini muncul dalam bentuk analisis yang kompleks tentang dijumpainya kegiatan rent-seeking yang demikian meluasnya di negara dunia ketiga (Kuntjoro--Jakti, J 990:6).*

Asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik adalah, bahwa setiap kelompok kepentingan (*self-interest*) berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (*effort*) yang sekecil-kecilnya. Pada titik inilah, seluruh sumberdaya ekonomi politik yang dimiliki, seperti lobi, akan ditempuh demi menggapai tujuan tersebut. Persoalannya adalah, jika produk dari lobi tersebut berupa kebijakan, maka implikasi yang muncul dapat sangat besar. Seperti diungkapkan oleh Olson, proses lobi tersebut dapat berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan (*decision-making*) berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak dapat merespons secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru (Olson, 1982:46 dalam Dasgupta, 1998:26).

### **Konsep Kemiskinan**

Secara konseptual kemiskinan diposisikan sebagai isu ekonomi dan isu sosial. Ketika kemiskinan dianggap sebagai permasalahan ekonomi, maka biasanya kemiskinan disederhanakan sebagai kekurangan pendapatan (per kapita) atau jumlah kalori yang dikonsumsi oleh individu. Sebaliknya pendekatan sosial memandang kemiskinan merupakan keterbatasan individu untuk terlibat dalam partisipasi pembangunan, baik akibat ketidakcukupan ketrampilan/pendidikan maupun pengucilan sosial (*social exclusion*) sehingga membuat individu tersebut tidak mampu memperoleh kesejahteraan (Yustika, 2007).

Kajian teoritis tentang konsepsi kemiskinan dapat dilanjutkan secara mendalam dengan mengklasifikasikan definisi dan pengukuran kemiskinan dalam empat perspektif. *Pertama*, pendekatan moneter (*the monetary approach*). Pendekatan ini paling jamak digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur kemiskinan, yakni melihat kemiskinan sebagai kekurangan individu untuk mencapai tingkat konsumsi (pendapatan) secara minimum, yang biasanya diukur dari garis kemiskinan. Melalui pendekatan ini, kesejahteraan diukur dari total konsumsi (kalori) yang dinikmati oleh individu, yakni diukur dari data pengeluaran atau pendapatan di bawah level minimum (garis kemiskinan) tergolong sebagai warga miskin. Pendekatan ini diterima secara populer, baik pada level domestik maupun internasional, karena mudah untuk diterapkan dan gampang dicarikan jalan keluarnya.

*Kedua*, pendekatan kemampuan (*the capability approach*). Pendekatan ini menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilihat sebagai ekspansi dari kemampuan manusia (human capabilities), bukan sekadar memaksimalkan kegunaan (*utility*) atau proksi atas kegunaan itu, yakni pendapatan. Dengan demikian pendekatan ini menolak konsep 'pendekatan moneter' dan lebih memfokuskan kepada indikator kebebasan (*freedom*) untuk menafkahi nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Dalam kerangka konseptual ini, kemiskinan didefinisikan sebagai pencabutan / kehilangan (*deprivation*) kemampuan atau kegagalan individu untuk mencapai kemampuan dasar / minimal, di mana kemampuan dasar (*basic capabilities*) tersebut tidak lain adalah kapabilitas untuk memaksimalkan fungsi-fungsi yang penting dari individu agar memperoleh level kecukupan hidup yang minimal (*minimally adequate levels*). Beberapa indikator yang digunakan dalam pendekatan ini adalah: harapan hidup, kesehatan, ketangguhan tubuh, perasaan (imajinasi), emosi, dan afiliasi (interaksi sosial dan perlindungan dan diskriminasi).

*Ketiga*, pendekatan pengucilan sosial (*social exclusion*). Pendekatan ini populer di negara-negara maju (*industrialized countries*) untuk mendeskripsikan terjadinya proses marjinalisasi dan

pencabutan hak-hak dasar ekonomi. Meskipun kelihatannya hal ini muskil, tetapi dalam realitasnya masih sering terjadi di negara maju yang telah menyediakan kesejahteraan secara komprehensif. Secara lebih spesifik, komunitas Uni Eropa, misalnya, mendefinisikan pengucilan sosial ini sebagai proses dimana individu atau kelompok secara menyeluruh atau parsial dikucilkan dari keterlibatan penuh (*full participation*) dalam masyarakat di mana mereka hidup. Di negara maju definisi tersebut diterjemahkan secara aplikatif melalui variable-variabel pengukuran semacam pengangguran, akses terhadap perumahan, pendapatan minimum dan kontak sosial, dan keterbatasan kewarganegaraan (*lack of citizenship*) atas hak-hak demokratis (*democratic rights*). Meskipun pendekatan ini populer di negara berkembang juga sudah mengadopsinya, seperti India, Venezuela, Tanzania, Tunisia, Kamerun, dan Thailand. (Laderich, et. al., dalam Yustika, 2007)

*Keempat*, perspektif metode partisipatif (*participatory methods*). Selama ini kemiskinan sebagai soal yang selalu didefinisikan dari pihak luar (*externally imposed*), tanpa pernah melihat kemiskinan dari perspektif kaum miskin sendiri (*views of poor people themselves*). Pendekatan ini, yang diinisiasi oleh Chambers, bertujuan untuk merombak dan mengubah praktik turun-temurun tersebut dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan untuk mendefinisikan kaum miskin dan besaran (*magnitude*) kemiskinan. Konsep penilaian kemiskinan partisipatif (PPA/*participatory poverty assessment*) ini diadopsi dari konsep 'participatory rural appraisal' (PRA), yang didefinisikan sebagai, merencanakan, dan bertindak. Secara praktikal, pendekatan ini dibagi dalam tiga kategori, yakni: (1) diasosiasikan dengan penentuan diri (*self determination*) dan pemberdayaan; (2) diasosiasikan dengan peningkatan efisiensi program, dan (3) menekankan pada pembelajaran yang saling menguntungkan (*mutual learning*). Tentu saja pendekatan yang terakhir ini lumayan rumit untuk diaplikasikan karena menyangkut aspek yang multiragam, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lokalitas lingkungan politik. Tetapi, kecenderungannya model ini sekarang mulai intensif dikerjakan karena dipandang gagal untuk menuntaskan persoalan kemiskinan secara meyakinkan.

Berbagai konsep pandangan tentang kemiskinan, tetap mengeksikasikan tiga pandangan tentang penyebab kemiskinan yang selama ini telah ada, yaitu pandangan struktural lebih dekat dengan perspektif pengucilan sosial (*social exclusion*), yakni kebijakan pemerintah yang tidak memihak kelompok miskin. Suatu bentuk kemiskinan yang telah sering diutarakan adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang timbul bukan karena sifatnya individual tetapi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat; dan bukan pula karena satu sebab, tetapi berbagai sebab yang berbelit dan melilit kondisi kelompok penduduk (Soemardjan, 1979). Kondisi itu berlangsung pula dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, penanggulangannya kurang dapat dijangkau oleh berbagai program pembangunan. Hal itu diperkuat pula dengan pengetahuan kita yang terbatas terhadap kondisi dan sifat-sifat kelompok-kelompok miskin itu.

Sedangkan pendekatan sumber daya lebih dekat dengan perspektif '*the monetary approach*' tapi dengan pengertian yang luas, di mana kemiskinan disebabkan karena ketidakterediaan sumber daya ekonomi (dan alam). Sedangkan kemiskinan kultural dikarenakan adanya sikap / mental sebagian kaum miskin yang tidak ingin berubah, yang sebagian ditunjukkan oleh adanya sikap malas. Berbagai sudut pandang tersebut akhirnya berujung pada dua kondisi kemiskinan yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah mereka yang di bawah garis kemiskinan (apabila yang digunakan adalah pendekatan moneter). Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi dimana sebagian kelompok masyarakat yang lain. Oleh karena itu, konsep kemiskinan relatif dekat dengan istilah ketimpangan pendapatan. Biasanya program-program kemiskinan dikonsentrasikan untuk mengangkat masyarakat yang tergolong ke dalam kemiskinan absolut.

### **C. TIGA CIRI KEMISKINAN DI INDONESIA**

Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS\$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak

tergolong «miskin dari segi pendapatan» dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang ekonomi. Fenomena ini pada dasarnya telah menjadi perhatian, isu, dan gerakan global yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Hal ini tercermin dari konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan Sosial (*World Summit in Social Development*) di Copenhagen pada tahun 1995. Salah satu fenomena sosial yang dipandang perlu penanganan segera dan menjadi agenda Tingkat Tinggi Dunia tersebut adalah **kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial** yang ada di setiap negara. Secara konstitusional, permasalahan dimaksud telah dijadikan perhatian utama bangsa Indonesia sejak tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945.

Krisis yang melanda perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997, bersamaan dengan kekeringan panjang, telah berpengaruh negatif terhadap kondisi makro ekonomi secara menyeluruh dan khususnya terhadap kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dipercaya telah meningkat secara drastis karena dampak krisis tersebut. Data dan hasil Sensus mini Desember 1998 mengindikasikan suatu kenaikan besar pada insiden kemiskinan dari periode sebelum krisis (1996) ke keadaan akhir 1998.

Besarnya dampak krisis terhadap kemiskinan pada awalnya diperdebatkan antara berbagai metodologi pengukuran, khususnya untuk estimasi tahun 1998, masalah penting yang perlu ditelaah adalah proses dari pengaruh krisis terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Krisis dipercaya telah memperburuk insiden kemiskinan terutama melalui kenaikan drastis harga-harga kebutuhan pokok dan komoditi-komoditi lainnya karena depresiasi nilai rupiah yang sangat cepat antara paruh kedua tahun 1998. Kenaikan harga-harga ini khususnya terhadap barang-barang input produksi impor, telah menyebabkan kontraksi sektor-sektor riil (dan sektor formal secara umum). Situasi ini kemudian diikuti oleh menjamurnya insiden kebangkrutan dan kegagalan bisnis, khususnya yang tergantung pada sumber-sumber dan komponen dari luar negeri. Sebagai akibatnya, tekanan pada kesempatan kerja di sektor informal perkotaan menjadi semakin besar, permintaan atas barang-barang dan jasa-jasa melemah, dan tingkat produksi serta pendapatan dari pertanian di pedesaan cenderung menurun drastis (Irawan dan Romdiati, 2000).

Lebih lanjut Irawan dan Romdiati (2000) mengungkapkan bahwa semua faktor tersebut pada gilirannya mengakibatkan suatu penurunan yang drastis pada pendapatan dan daya beli dari mayoritas penduduk. Memahami proses dampak krisis seperti ini, memburuknya angka kemiskinan adalah konsekuensi logis. Proses “pemiskinan” ini melibatkan mereka yang sebelum krisis mempunyai tingkat kesejahteraan, seperti ditunjukkan oleh rata-rata pengeluaran per kapita, sedikit di atas garis kemiskinan. Kelompok penduduk ini sering diistilahkan sebagai *near poor* yang mempunyai tingkat kesejahteraan sangat rawan terhadap perubahan sumber penghasilan dan tingkat pendapatan mereka serta terhadap gejolak harga-harga kebutuhan pokok.

Manifestasi dari komitmen Indonesia dimaksud terlihat dari beberapa lembaga pemerintah maupun swasta yang mempunyai konsentrasi dalam penanganan kemiskinan. Berbagai model penanganan kemiskinan yang telah dijalankan cukup banyak, misalnya Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, Jaringan Pengaman Sosial (Social Safety Net Program) dan lain-lain.

Pada dekade 1976-1996, persentase penduduk miskin di Indonesia pernah mengalami penurunan yaitu dari 40,1% menjadi 11,3%, namun pada periode 1996-1998 angka ini menjadi 24,29% atau 49,5 juta jiwa. Bahkan *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3% (BPS, 1999). Berdasarkan data Susenas menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta jiwa tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa tahun 1998. Pada tahun 1999, jumlah penduduk miskin sebesar 37,5 juta jiwa. Tingkat kemiskinan di

---

perkotaan meningkat dari 12% tahun 1996 menjadi 26% tahun 1998. Namun demikian jumlah penduduk miskin terbesar tetap berada di pedesaan, yaitu diperkirakan sebesar 32 juta jiwa pada tahun 1998 dan 25 juta jiwa pada tahun 1999 (Tabor, Soekirman dan Martianto, 2000).

Lebih jauh, kenaikan substansial pada kemiskinan absolut pada periode Februari 1996–Desember 1998 dalam kenyataannya juga berkaitan dengan perubahan drastis pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dibandingkan tahun 1996, garis kemiskinan pada tahun 1998 meningkat sekitar 153,5% (dari Rp38.246 menjadi Rp96.959/kapita/bulan) dan 165,5% (dari Rp27.413 menjadi Rp72.780/kapita/bulan) masing-masing di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai nominal dari pengeluaran yang dibayar oleh seseorang per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya pada Desember 1998 telah lipat lebih dari dua kali dibandingkan nilai pada Februari 1996. Besarnya kenaikan garis kemiskinan tersebut konsisten dengan meroketnya harga-harga, khususnya komoditi makanan pada periode yang sama, dan sebagian kenaikan karena pendefinisian kembali pada paket non-makanan dalam garis kemiskinan. Dari Februari 1996 ke Desember 1998, tingkat inflasi dilaporkan sebesar 98,64% untuk indek umum, dan 148,6% untuk kelompok makanan (Irawan dan Romdiati, 2000).

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, Periode 1996 – 2005**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97

*Sumber: diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*

**Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Penduduk Golongan Miskin, Golongan Menengah dan Golongan Kaya, Periode 1999 – 2004**

Tahun	40% Penduduk Pendapatan Rendah	40% Penduduk Pendapatan Sedang	20% Penduduk Pendapatan Tinggi
1999	21,66	37,77	40,57
2002	20,92	36,89	42,19
2003	20,57	37,10	42,33
2004	20,80	37,13	42,07

*Sumber: Biro Pusat Statistik*

Lebih dari separuh penduduk Indonesia yang berjumlah 210 juta pada tahun 2002 rawan terhadap kemiskinan. Pada tahun tersebut, persentase kemiskinan telah mengalami penurunan, namun

secara absolut jumlah mereka masih tergolong tinggi, yaitu 43% atau sekitar 15,6 juta (BPS dan Depsos 2002). Bank Dunia memperkirakan 53% penduduk atau sekitar 111 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan standar internasional yaitu US\$ 2 per hari. Menurut data resmi Susenas (BPS, 2006), jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 juta jiwa (15,97 persen) menjadi 29,05 juta jiwa (17,75 persen). Sementara jumlah penganggur menurut data Sakernas (BPS, 2006) juga terus meningkat dari 10,9 juta jiwa (10,3 persen) pada Februari 2005 menjadi 11,1 juta jiwa (10,4 persen) pada Februari 2006. Diantara angka tersebut, diduga jumlah fakir miskin relatif banyak. Tanpa mengurangi arti pentingnya pembangunan yang sudah dilakukan, angka kemiskinan tersebut mengindikasikan konsep model yang dibangun belum mampu membentuk sosial ekonomi masyarakat yang tangguh.

Garis kemiskinan yang dibuat itu masih merupakan garis kemiskinan yang masih rendah. Artinya, ratusan jiwa umat manusia belum mampu untuk membeli penerangan listrik, menikmati air bersih, nilai gizi yang lebih berkualitas, rumah yang layak, dan lokasi pemukimannya masih terisolasi baik secara sosiologis maupun geografis. Mereka masih belum mampu menyekolahkan anak-anaknya, belum memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, dll. Sekarang ini semua biaya kebutuhan sehari-hari terasa memberatkan. Bukan hanya harga sembilan bahan pokok yang terus meningkat, tetapi biaya-biaya lain, seperti biaya transportasi, listrik, dan sekolah, juga terasa memberatkan. Kondisi ini sudah sejak lama terlihat seperti dari meningkatnya angka putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga untuk menopang pendidikan anak-anak pasca sekolah menengah pertama membuat banyak yang tidak bisa meneruskan pendidikan ke tingkat menengah atas, apalagi perguruan tinggi. Tidak usah heran apabila di jalan-jalan, kita melihat begitu banyak anak-anak yang hanya duduk-duduk tanpa jelas kegiatannya. Situasi yang mengimpit itu suka tidak suka mengimbas ke dalam rumah tangga. Kita lihat belakangan ini tindak kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga. Kita bukan hendak mencari pembenaran atas tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kita harus mengurai akar persoalan. Jangan biarkan rasa frustrasi terus mengimpit sehingga membuat orang terjebak dalam pikiran pendek.

Ketika kita berbicara tentang persoalan yang satu ini, jalan pemecahannya tidak bisa lain adalah perbaikan kondisi ekonomi. Dengan kegiatan ekonomi yang bergerak lebih pesat akan tercipta lapangan kerja lebih banyak. Ketika pekerjaan diperoleh, orang akan bisa mempunyai pendapatan. Dengan pendapatan itulah mereka bisa memiliki daya beli dan memperbaiki kualitas keluarga. Ketika daya beli masyarakat semakin kuat, perekonomian pun akan bisa bergulir lebih cepat lagi.

Beberapa koreksi dari para ahli menunjuk, bahwa salah satu permasalahan yang mendasar adalah orientasi pembangunan ekonomi yang kurang berpihak pada golongan berpenghasilan rendah ekonomi (*grass root*). Kondisi ini tercermin dari konsentrasi industrialisasi berskala menengah ke atas, sehingga sektor ekonomi yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat kurang diperhitungkan. Menurut catatan Halwani (1999), sebagian besar (98,2%) adalah unit usaha kecil dan industri rumah tangga dengan tenaga kerja sebanyak 3.484.408 orang (63,3%). Industri yang tergolong dalam usaha berskala besar dan sedang (0,8%) dengan tenaga yang terserap sebanyak 1.691.435. (32,7%). Namun jika hasil nilai tambah dari dua jenis kegiatan tersebut diperbandingkan, maka hasil yang diperoleh dari sektor industri kecil masih jauh dari yang harapan yakni sebesar 17,8% (Rp.2,03 trilyun), sedangkan industri berskala besar (0,8%) telah memberikan nilai tambah Rp.9,35 trilyun (82,2%).

#### **D. PENGARUH VARIABEL POLITIK DALAM KEMISKINAN**

Di dalam perekonomian Indonesia, penyebab utama dari munculnya kemiskinan adalah malapraktik pembangunan akibat formulasi kebijakan ekonomi (sosial dan politik) yang salah, Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diproduksi oleh pemerintah sejak dulu cenderung mendahulukan kepentingan pemilik modal dan sektor industri/jasa ketimbang pelaku ekonomi kecil dan sektor pertanian. Bahkan, kerap kali pelaku ekonomi kecil yang banyak digeluti oleh masyarakat, seperti sektor informal banyak digusur untuk digantikan dengan kegiatan ekonomi yang lebih modern, seperti pembuatan pabrik, pusat perbelanjaan, dan sentra-sentra perdagangan dan industri.

Akibat proses tersebut jumlah orang miskin di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya kenaikan harga BBM secara berlebihan (sekitar 100%) pada bulan oktober 2005 sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Sebenarnya telah banyak kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tersebut, namun secara umum masih terdapat banyak kelemahan dari kebijakan kemiskinan tersebut (Yustika, 2007). Kelemahan pertama adalah berkaitan dengan kebijakan kemiskinan yang dilaksanakan secara seragam (general) tanpa mengaitkan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah (komunitas). Akibatnya, kebijakan sering tidak relevan di satu tempat (komunitas), walaupun di tempat (komunitas) lain program itu berhasil. Kedua, pihak luar (*externally imposed*) dan memakai parameter yang terlalu ekonomis (*moneter*). Implikasinya, konsep penanganan kemiskinan mengalami bias sasaran dan mereduksi hakikat dari kemiskinan itu sendiri. Ketiga, penanganan program kemiskinan mengalami birokratisasi yang terlampau dalam, sehingga banyak yang gagal akibat belitan prosedur yang terlampau panjang. Keempat, kebijakan kemiskinan sering diboncengi dengan motif politik yang amat kental, sehingga tidak memiliki makna bagi penguatan sosial ekonomi kelompok miskin. Kelima, kebijakan kemiskinan kurang mempertimbangkan aspek ekonomi kelembagaan sebagai prinsip yang harus dikedepankan, sehingga sebagian kebijakan tersebut tidak berhasil karena aturan main yang didesain tidak sesuai dengan kebutuhan.

Di samping itu ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Berita utama kompas pada tanggal 20 April 2006 melaporkan pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pembukaan pameran Inacraft 2006. Sungguh menarik karena berisi tentang pengakuan bahwa jumlah pengangguran dan kemiskinan tidak menurun walaupun ada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu masyarakat di buat tercengang dengan melejitnya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan menguatnya nilai tukar rupiah.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa ada hubungan antara apa yang dinamakan indikator ekonomi makro dan penderitaan rakyat bisa bertolak belakang. Hampir semua ekonom dan lembaga-lembaga internasional selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi mesti mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Bahkan dihitung secara eksak bahwa pertumbuhan ekonomi sekian persen akan mengurangi pengangguran sekian persen. Hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi juga tidak sembarangan dikorelasikan karena jika hanya memfokuskan pada peningkatan investasi sekian persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sekian persen, yang terjasi adalah pengejaran target pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperdulikan apakah pertumbuhan tersebut lebih memperkaya yang sudah kaya dan lebih menyengsarakan yang sudah

miskin. Pertumbuhan ekonomi memang tidak secara otomatis menciptakan lapangan kerja atau dapat mengurangi angka kemiskinan.

#### **E. PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN SOLUSI MULTI DIMENSI**

Dalam kerangka penanggulangan kemiskinan tersebut, hampir semua kajian masalah kemiskinan berporos pada paradigma modernisasi (*the modernisation paradigm*) dan the product cantered model yang kajiannya didasari teori pertumbuhan ekonomi capital dan ekonomi neoclastic ortodox (Elson, 1977, Suharto, 2002). Secara umum, pendekatan yang dipergunakan lebih terkonsentrasi pada individual poverty sehingga aspek structural and social poverty menjadi kurang terjamah. Dalam Suharto (2002) dikemukakan:

*”In its standardised conception of poverty, for example, the poor are seen almost as passive victims and subjects of investigation rather than as human beings who have something to contribute to both the identification of their condition and its improvement.”*

Beberapa pendekatan dimaksud tercermin dari tolok ukur yang digunakan untuk melihat garis kemiskinan pada beberapa pendekatan seperti *Gross National Product (GNP)*, *Human Development Index (HDI)* dan *Human Poverty Index (HPI)*, *Social Accounting Matrix (SAM)*, *Physical Quality of Life Index (PQLI)*.

Menurut Basri (2002), untuk menghapus masalah kemiskinan yang kini semakin krusial di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah untuk merombak struktur yang otoritarian dan monopolistik, dengan strategi penguatan posisi politik dan ekonomi kelompok masyarakat miskin. Penguatan posisi politik dapat dilakukan dengan mendorong pengorganisasian diri masyarakat miskin demi tindakan yang partisipatif, dengan cara merubah peraturan yang membatasi (seperti masalah perizinan dan formalisasi) menjadi peraturan yang memfasilitasi. Sementara, penguatan ekonomi dilakukan dengan strategi merombak struktur ekonomi yang monopolistik dan antipersaingan menjadi struktur yang lebih adil dan kondusif serta strategi untuk meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap sumber daya. Untuk mewujudkannya perlu upaya simultan dan komprehensif sebagai berikut:

- Memfokuskan investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pendidikan dasar.
- Menyusun kebijakan yang mengarah pada stabilitas ekonomidengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapaidan hasilnya bisa terdistribusikan pada seluruh lapisan masyarakat secara adil.
- Menciptakan lingkungan kompetisi yang fair bagi usaha kecil, dengan jalan merombak struktur ekonomi yang monopilistik dan antipersaingan.
- Meningkatkan akses kelompok ekonomi kecil terhadap berbagai sumber daya ekonomi, yaitu terutama modal, tanah, serta informasi dan teknologi.
- Melakukan deregulasi terhadap komoditi yang pemasarannya diatur atau dipegang pemerintah.
- Mengubah bentuk insentif institusional bagi birokrat di tingkat lokal, dengan jalan memberikan pelayanan perizinan usaha secara gratis, sehingga usaha kecil akan terdorong untuk mendaftarkan usahanya dan pemerintah daerah dapat memperoleh peningkatan pajak dari usaha kecil tersebut.
- Menghapuskan berbagai pungutan bagi usaha kecil.
- Menghapuskan kredit bersubsidi pada bunga dan membiarkan penyediaan kredit berjalan dengan mekasisme pasar.
- Mengalihkan subsidi dalam bentuk bantuan biaya operasional untuk institusi yang mempunyai kinerja yang baik.

- Mendorong kemungkinan pembentukan lembaga akreditasi nirlaba bagi insitusi keuangan yang independen.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Mendorong penggunaan model skim pembiayaan oleh lembaga perbankan terhadap usaha kecil.
- Mendorong kemungkinan pembentukan lembaga penjamin bagi usaha kecil untuk pinjaman yang lebih besar, misalnya ke bank.
- Melonggarkan perizinan pendirian organisasi seperti serikat kerja.
- Menyediakan lembaga konsultasi untuk membantu masyarakat paling miskin yang bisa merangsang lebih banyak pemberian pinjaman dan dukungan kredit mikro untuk masyarakat yang sangat miskin.
- Memacu penyediaan lapangan pekerjaan penuh dan produktif serta memperkuat integrasi sosial.
- Mencabut distorsi kebijakan terhadap produksi pertanian.
- Melonggarkan peraturan yang membatasi permintaan tenaga kerja.
- Mendorong investasi pada infrastuktur fisik, penyuluhan pertanian.

Pengentasan kemiskinan tetap merupakan komponen penting program kerjasama pembangunan dan akan dicapai melalui berbagai tujuan yang saling terkait:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan manajemen ekonomi dan mempercepat proses reformasi struktural;
2. Meningkatkan akuntabilitas dengan memperkuat lembaga dan praktek demokrasi;
3. Meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan modal sumber daya manusia penduduk miskin dan kurang mampu;
4. Mengurangi kerawanan dengan meredam dampak konflik, bencana alam dan lain-lain di antara masyarakat rawan kemiskinan.

Fokus peningkatan modal sumber daya manusia akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi dan melalui pendekatan bantuan sasaran khusus kabupaten dalam bentuk program baru pembangunan berfokus kabupaten melalui program baru *Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy* (ANTARA). Menurut laporan tentang kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh World Bank (2006), bidang-bidang khusus yang patut diwaspadai dalam pemfokusan perhatian pada masalah kemiskinan adalah:

- Angka gizi buruk (malnutrisi) yang tinggi dan bahkan meningkat pada tahun-tahun terakhir: seperempat anak di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk di Indonesia, dengan angka gizi buruk tetap sama dalam tahun-tahun terakhir kendati telah terjadi penurunan angka kemiskinan.
- Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama: angka kematian ibu di Indonesia adalah 307 (untuk 100.000 kelahiran hidup), tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia; hanya sekitar 72 persen persalinan dibantu oleh bidan terlatih.
- Lemahnya hasil pendidikan. Angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin: di antara kelompok umur 16-18 tahun pada kuintil termiskin, hanya 55 persen yang lulus SMP, sedangkan angka untuk kuintil terkaya adalah 89 persen untuk kohor yang sama.

- Rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin. Untuk kuintil paling rendah, hanya 48 persen yang memiliki akses air bersih di daerah pedesaan, sedangkan untuk perkotaan, 78 persen.
- Akses terhadap sanitasi merupakan masalah sangat penting. Delapan puluh persen penduduk miskin di pedesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap tangki septik, sementara itu hanya kurang dari satu persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran berpipa.

**Indonesia memiliki peluang emas untuk mengentaskan kemiskinan dengan cepat.**

Pertama, mengingat sifat kemiskinan di Indonesia, dengan memusatkan perhatian pada beberapa bidang prioritas dapat diperoleh keberhasilan dalam (perang) melawan kemiskinan dan rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Kedua, sebagai negara penghasil minyak dan gas bumi, Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan meraih keuntungan dari peningkatan penerimaan negara-sebesar AS\$10 milyar pada tahun 2006-berkat melonjaknya harga minyak dan pengurangan subsidi BBM. Ketiga, Indonesia bisa memetik manfaat yang lebih besar lagi dari proses demokratisasi dan desentralisasi yang masih terus berlangsung.

**Tantangannya adalah bagaimana membuat ‘Indonesia baru’ itu bermanfaat bagi penduduk miskin (*work for the poor*).**

Itulah yang merupakan fokus laporan ini, yang bertujuan memberi sumbangan terhadap wacana kebijakan dan proses pengambilan keputusan di Indonesia melalui: (1) analisis baru dan lebih komprehensif tentang diagnose kemiskinan empiris; dan (2) usulan kebijakan dan program-program konkrit untuk sebuah rencana aksi strategis untuk mencapai tujuan-tujuan pengentasan kemiskinan yang telah dicanangkan oleh Indonesia.

**Indonesia bisa belajar dari pertumbuhan ekonomi, kebijakan dan program kemasyarakatannya sendiri.**

Indonesia telah memiliki sukses luar biasa dalam pengentasan kemiskinan sejak tahun 1970-an. Periode dari akhir tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1990-an dianggap sebagai episode «pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor growth*) terbesar dalam sejarah perekonomian negara manapun, dengan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan lebih dari separuhnya. Setelah sempat meningkat selama krisis ekonomi (23 persen lebih pada tahun 1999), angka kemiskinan pada umumnya tidak jauh dari angka-angka sebelum krisis (16 persen pada tahun 2005). Kunci dari pemulihan tersebut terletak pada stabilitas ekonomi makro sejak pertengahan tahun 2001 dan penurunan harga barang, terutama beras yang penting untuk konsumsi masyarakat miskin. Akan tetapi, walaupun ada penurunan angka kemiskinan secara terus menerus, belum lama ini terjadi kenaikan angka kemiskinan yang tak terduga. Penyebab utama terjadinya perubahan tersebut diperkirakan adalah melonjaknya harga beras-diperkirakan kenaikan sekitar 33 persen harga beras yang dikonsumsi oleh kaum miskin-antara bulan Februari 2005 dan Maret 2006, yang sebagian besar menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin menjadi 17,75 persen.

Berdasar uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (*comprehensive*), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya. Menurut Mujiyadi dan Gunawan (2000), pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu

memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki. Uraian ini mengisyaratkan, bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan (keluarga fakir miskin) perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki. Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia "Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia"*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *"Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan"*, Draft Ringkasan-Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Per 25 Agustus 2005.
- Alfian, et al (editor). (1980). *"Kemiskinan struktural : Suatu bunga rampai."* Jakarta:Pulsar.
- Arika, Yovita, dkk., *Laporan Akhir Tahun Bidang Ekonomi*
- Krisis Ekonomi 1998, *Tragedi tak Terlupakan*. Kompas,1998.
- Baasir, Faisal., *"Pembangunan dan Krisis: Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- BPS, *"Tingkat Kemiskinan"* di Indonesia tahun 2005-2006
- Caporaso, James A. Dan David P. Levine. *"Theories of Political Economy"*. Cambridge University Press. England. 1993.
- CIFOR, *"Kemiskinan dan Desentralisasi"*, Bogor, 2003.
- Dunia essai.com, *"Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?"*. 2006
- Editorial Media Massa Indonesia, *"Arsip untuk Kategori 'Kemiskinan':Kemiskinan yang Menangis"*, Diterbitkan Mei 15th, 2007.
- Gie, Kwik Kian, *"Kebijakan ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar"*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Gunawan & Sugianto, *"Kondisi Keluarga Fakir Miskin"*.
- Hamid, Edy Suandi, *"Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia"*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Hanson, J.L., *"An Introduction to Applied Economics"*, McDonald & Evans, L.td, London, 1969.
- Hasibuan, Nurimansjah, *"Kemiskinan Struktural di Indonesia : Menembus Lapisan Bawah"*, Artikel bebas.

- ILO, *Perlindungan Sosial Bagi Semua*”, Kantor Perburuhan Internasional, 2004.
- Irawan, P,B & H, Romdiati., *Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya untuk Strategi Pembangunan*. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI, Jakarta. 2000.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. *Pendekatan Politik Ekonomi (Political-Economy): Jembatan di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik*. Jurnal Ilmu Politik 8. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1990.
- Lane, Erik-Jan & Ersson, Stante., *“Ekonomi Politik Komparatif: Demokratisasi Pdan Pertumbuhan, Benarkan kontradiktif?”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Saptutyarningsih, Endah., *“Analisis Tabungan Domestik dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990.1-2000.2:Metode Persamaan Simultan”*, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol.4 No.2, 2003.
- Staniland, Martin., *“Apakan Ekonomi Politik Itu?”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- The World Bank, *“Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”*, Gradasi Aksara, 2006.
- Yuliana, ” *Kaitan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Status Gizi*”, 2003.
- Yustika, Ahmad Erani, *Perekonomian Indonesia “Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi”*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007.